

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia, usaha koperasi yang berasaskan kekeluargaan ini sudah banyak sekali membantu masyarakat terutama dalam perekonomian. Koperasi merupakan soko guru perekonomian, yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Soko perekonomian yang dimaksud adalah “tulang punggung” atau “pilar” perekonomian. Koperasi memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, seperti halnya anggota dalam melakukan transaksi di koperasi memiliki kemudahan dalam bertransaksi yang sesuai dengan koperasinya itu sendiri.

Pada umumnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang sukarela dan berjuang untuk mensejahterakan koperasi dalam bentuk badan usaha yang demokratis. Selain itu juga koperasi adalah organisasi yang memiliki sifat terbuka bagi masyarakat terutama anggotanya itu sendiri. Koperasi memiliki banyak usaha di dalam menjalankan pratikanya contohnya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi ini memberikan masyarakat pinjaman uang sekaligus untuk menyimpan uang untuk anggotanya. Koperasi memiliki peranan yang paling penting bagi masyarakat seperti dalam pengembangan potensi masyarakat,

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu dalam perekonomian.

Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu Koperasi simpan pinjam yang bersifat terbuka dan sukarela untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki dua modal yang pertama yaitu, berasal dari anggotanya itu sendiri seperti simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan hibah, selanjutnya adalah modal yang terdiri dari pinjaman yang diterima oleh koperasi atau lembaga lainnya.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk memberikan pinjaman uang berbunga ringan yang di pergunakan untuk modal usaha anggota dan juga anggota dapat menyimpan uang yang nantinya menjadi tabungan anggota. Koperasi simpan pinjam harus memiliki azas keyakinan dan kemampuan untuk anggotanya itu sendiri agar koperasi dapat dipercaya oleh anggota dan koperasi dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perannya yaitu koperasi simpan pinjam.

Dalam kelancaran perkembangan koperasi di adakannya pengelolaan pertanggung jawaban seperti laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman koperasi berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Laporan keuangan yang sudah dibuat oleh koperasi memberikan informasi tentang posisi keuangan bagi pengelola, pengurus, anggota, dan lainnya.

Laporan keuangan adalah segala macam transaksi yang dicatat dan melibatkan uang biasanya laporan keuangan di buat dalam periode tertentu. Laporan keuangan

dibuat untuk mengetahui financial perusahaan apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya. Laporan keuangan dibuat dengan benar dan cermat supaya tidak ada kesalahan dalam pelaporan pertanggung jawaban. Jenis dalam sebuah laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan, catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan memerlukan pedoman agar dalam penyusunannya dapat disesuaikan dalam peraturan yang berlaku. Tujuan dari pedoman penyusunan laporan keuangan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan sebagai perbandingan serta pengambil keputusan yang nantinya digunakan untuk waktu yang akan datang. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal adalah pemegang saham atau investor, manajemen koperasi dan, karyawan. Sedangkan eksternal adalah kreditur dan pemerintah.

Pada laporan keuangan dasarnya harus memperhatikan sebuah informasi yaitu kualitas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan akan meyakini dalam pemberian keputusan dengan sebuah informasi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta berkualitas dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah informasi dimana laporan tersebut disajikan dengan benar dan tepat, dalam arti kualitas laporan keuangan akan menunjukkan sebuah konsep kualitas informasi dalam laporan keuangan yang disajikan.

Di Indonesia sendiri standar laporan keuangan memiliki empat pilar antara lain PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK-Syariah dan, SAP. PSAK biasanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, SAK-ETAP digunakan untuk usah mikro kecil menengah, PSAK-Syariah digunakan untuk lembaga badan usaha syariah, sedangkan SAP digunakan untuk badan lembaga pemerintahan.

Penerapan pernyataan yang ada di PSAK 27 tentang akuntansi koperasi telah digantikan oleh SAK ETAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Penyusunan laporan keuangan yang tersusun atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) lebih sulit dan memberikan kesulitan bagi entitas atau koperasi. Dan disusun lah SAK-ETAP untuk digunakan usaha lebih mudah serta efektif dalam pelaporan keuangan. Menurut IAI dalam SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas dimaksud ialah sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, serta merancang laporan keuangan sebagai tujuan umum pengguna eksternal.

Standar laporan keuangan yang diterapkan akan membawa kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan serta akan memberikan kualitas terhadap laporan keuangan tersebut. Pada koperasi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar, maka akan membuat peningkatan akuntabilitas mereka dalam masyarakat. Akuntabilitas yang berdampak positif akan membuat koperasi menjadi lebih baik dan menjadi laporan yang berkualitas serta bisa dipahami oleh berbagai pihak yang akan membaca laporan keuangan tersebut.

Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik diharapkan bisa mempermudah koperasi Indonesia pada pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. SAK-ETAP dibuat untuk mempermudah koperasi dalam pembuatan laporan keuangan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi yang dibangun oleh pegawai negeri dan dikelola untuk kepentingan pegawai negeri. KPRI lebih memfokuskan untuk mensejahterakan anggota pegawai negeri yang membutuhkan penghasilan tambahan. KPRI biasanya membantu anggotanya dengan meminjamkan dana untuk keperluan kehidupan anggota. KPRI berusaha agar para pegawai negeri tidak meminjam kepada bank atau renternir yang memberikan bunga yang cukup tinggi.

KPRI merupakan koperasi yang banyak ditemui di Indonesia dan terdapat pada setiap Kabupaten. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “HIKMAH GURU CIKERUH” yang berada di kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang adalah koperasi yang berada pada bidang simpan pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman dan menerima simpanan bagi para guru yang berada di Kabupaten Sumedang. KPRI Hikmah Guru Cikeruh memberikan pelayanan usaha simpan pinjam, dan pelayanan untuk anggota dan bukan anggota atau lain pihak yang ada hubungannya dengan koperasi.

Pada KPRI Hikmah Guru Cikeruh terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu KPRI Hikmah Guru Cikeruh tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta pada laporan catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi di jelaskan pada penjelasan neraca yang seharusnya

dijelaskan pada laporan catatan atas laporan keuangan. Dalam sebuah penyajian laporan keuangan pada KPRI Hikmah Guru Cikeruh hanya menyajikan laporan neraca, perhitungan laba rugi dan penjelasan neraca. Hal ini akan berdampak pada penyajian laporan keuangan yang kurang lengkap.

Standar Akuntansi keuangan koperasi yang berlaku di Indonesia merupakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun pada penerapannya ada banyak koperasi belum mematuhi atau menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) guna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan memiliki kriteria nilai informan yang disyaratkan seperti keandalan, ketepatan waktu, dapat dibandingkan, relevan. Mengingat dalam SAK ETAP unsur tersebut merupakan hal terpenting dalam pengambilan keputusan

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Zainal (2019) mengtakan pada koperasi masih belum menyatakan standar yang berlaku yaitu SAK ETAP dan bisa dilihat pada laporan keuangan pada koperasi membuat laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan catatan laporan keuangan, yang seharusnya ada lima laporan keuangan harus disajikan oleh koperasi yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitiannya pun terdapat akun yang kurang sesuai dalam penyajian neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Alasan lain juga diungkapkan oleh Aitul (2020) menyatakan bahwa koperasi yang ditelitinya masih belum sesuai dengan standar yang berlaku dikoperasi karena bisa dilihat

dalam laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi hanya terdapat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan terdapa akun-akun yang tidak sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan diatas, penulis akan meneliti mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI “HIKMAH GURU CIKERUH”. Dalam penulisan skripsi penulis membawa judul sebagai berikut :
“IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA HIKMAH GURU CIKERUH”.

1.2 Identifikasi Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang maka peneliti dapat di indetifikasikan masalah-msalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Guru Cikeruh?
2. Apakah implementasi penerapan laporan keuangan pada KPRI HIKMAH GURU CIKERUH sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan data dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Guru Cikeruh mengenai laporan keuangan yang disajikan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh Sarjana Akuntansi Keuangan di Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam penerapan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Guru Cikeruh.
2. Untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Guru Cikeruh.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi khususnya dalam akuntansi

keuangan dalam hal Analisis penerapan akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi koperasi

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyajian laporan keuangan di periode yang akan datang agar sesuai dengan SAK-ETAP. Hasil dari penelitian ini berharap bisa bermanfaat untuk KPRI Hikmah Guru Cikeruh dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Bagi Institut

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang sudah diajarkan diperguruan tinggi dan menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk peneliti yang akan datang di bidang yang sejenis.

IKOPIN